

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentas politik internasional, sebagaimana diyakini kaum realis, berada dalam kondisi anarkis.¹ Meskipun pendapat ini tidak dapat diterima begitu saja, setidaknya kenyataan menunjukkan sebagian ke arah yang dimaksud. Invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 yang diikuti oleh pengklaiman atas wilayah tersebut sebagai provinsi ke-19 miliknya², serta keterlibatan dan kengototan Amerika Serikat dan kemudian didukung, baik secara fisik maupun moral, oleh sejumlah negara yang disebut sebagai sekutunya untuk menyerang Irak tanpa adanya mandat resmi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dengan alasan-alasan yang sulit diterima oleh banyak kalangan Internasional pada pertengahan Maret 2003 silam, semakin mengokohkan keampuhan asumsi dasar dan sekaligus menjadi prinsip utama pandangan realisme politik tersebut.

Kondisi anarkis inilah yang nantinya melahirkan kekerasan-kekerasan politik, baik kecenderungan domestik suatu negara maupun konteks

¹ Hans J. Morgenthau. *Politik Antar-Bangsa*. Jakarta : YOI, 1990. Hal .13. Dalam bukunya ini, Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa realisme politik melihat realitas politik penuh dengan ketidakpastian dan keadaan yang tidak masuk akal yang sistematis. Oleh karena itu, Negaranegara, dalam interaksi mereka, lebih menonjolkan kepentingan nasionalnya yang didasarkan pada kemampuan kekuatan nasional yang mencakup (1) Geografi; (2) sumber daya alam; (3) kemampuan industri; (4) kesiapan militer; (5) penduduk; (6) karakter nasional; (7) moral nasional; (8) kualitas diplomatic; dan (9) kualitas pemerintah. Lihat ibid.hal.157-227

²Secara administratif, Negara Irak dibagi dalam 18 provinsi (governorate / muhafazah) yaitu Bahgdad; Salah Ad-Din; Divala; Wasith; Maysan; Al-Basrah; Dhi Qar; Al-Muthanna; Babil; AlQadisiyah; Al-

internasional yang melibatkan negara-negara lain dalam urusan domestik suatu negara. Akan tetapi, bukan berarti bahwa kekerasan merupakan realitas politik yang pasti dan selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, kekerasan-kekerasan tersebut berlangsung di Irak, khususnya selama periode berkuasanya rezim Saddam Hussein sampai bulan Februari 2006.

Sebelumnya, Saddam Hussein mengawali era keemasannya dengan terror. Pada 18 Juli 1979 Saddam mengultimatum hukuman mati atas Muhyi Abdul Al-Husein Mashadi --- Sekretaris Jenderal Dewan Komando Revolusioner --- dan sejumlah pejabat penting lainnya yang terbukti terlibat dalam upaya penggulingan rezim di Baghdad. Meskipun demikian, suara-suara pembebasan atau bahkan upaya-upaya pendemokratisasian hak dasar tumbuh melalui gerakan-gerakan oposisi seperti Iraqi National Council (INC) pimpinan Achmad Chalabi dan SCIRI (Supreme Council of Islamic Revolution in Iraq) pimpinan Ayatollah Muhammad Bakr Al-Hakim yang memindahkan markasnya di Teheran, Iran.

Belum lama setelah Perang Teluk II usai, Saddam Hussein mengerahkan sekitar 30.000 pasukannya untuk menyerang wilayah Kurdistan dan menduduki ibukotanya, Arbil, awal September 1996. Saddam Hussein beralasan untuk memenuhi permintaan pemimpin partai Demokratik Kurdistan (PKDK) Muhammad Barzani untuk mengucis lawannya pemimpin

Uni Patriotik Kurdistan (UPK), Jalal Talabani³. Hal yang sama pernah dilakukan pasukan Saddam Hussein, tepatnya 16 Maret 1988. Pesawat--pesawat tempur membombardir Hallabja, sebuah kota yang terletak di provinsi As-Sulaymaniyah, sekitar 260 kilometer Timur-Laut Baghdad. Serangan "Jum'at Kelabu" tersebut dipimpin oleh sepupu Saddam Hussein, Jenderal Ali Hasan Al-Madjid. Korban tewas akibat serangan tersebut diperkirakan mencapai 6.800 orang dan sebagian besar dari mereka adalah penduduk sipil. Senjata kimia yang digunakan untuk membunuh orang-orang Kurdi adalah senjata biologi dan kimia yang mematikan : Anthrax, Gas saraf VX, Aflatoksin, Butolinum, Sarin dan Gas Mustard.⁴

Atas peristiwa tersebut, Saddam Hussein mendapat tekanan dari masyarakat internasional. Bahkan, sebelumnya, saat pasukan Saddam Hussein memadamkan pemberontakan kaum Syiah di selatan Irak dengan tindakan keras, publik internasional mengekspresikan sikap tidak simpatik mereka terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Namun, dengan cerdas, Saddam menggunakan tekanan Barat itu untuk berkampanye di dalam negeri.

UNSCOM (United Nations Special Commission on Missile), badan

³ Mustafa Abdul Rahman. *Geliat Irak menuju era pasca Saddam*. Jakarta : Kompas, 2005 . hal.3
Di Kurdistan terdapat dua partai utama, disamping partai-partai lainnya, yaitu partai demokratik Kurdistan (PDK) yang didirikan Mustafa Barzani tahun 1946 . setelah Mustafa Barzani meninggal (1979) , jabatan ketua partai dipegang putranya, massoud Barzani; dan Uni Patriotik Kurdistan (UPK) yang didirikan Jalal Talabani pada bulan Juni 1975 akibat perpecahan didalam PDK. Sejak saat itu, Kurdistan terpecah menjadi dua wilayah yang sering bersaing, yaitu "Berzanistan" di Timur laut yang dikuasai PDK dan "Talibanistan" di Barat Daya yang dikuasai UPK. Lihat Trias Kucahyono. *Bulan Sabit Diatas Baghdad*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005. Hal.173-174

⁴ Anthrax, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, menyerang kulit sehingga melepuh dan penuh luka; Butolinum, kuman yang meracuni makanan dan mengakibatkan korban mual, diare, dan melumpuhkan pernafasan serta jantung; Aflaktoksin, racun dari jamur yang bias menyebabkan kanker hati; Gas saraf VX, memiliki bentuk seperti oli mobil dimana satu tetes kecil saja sudah cukup membunuh orang;

inspeksi senjata PBB untuk Iraq, sempat beberapa kali mengirim timnya ke Baghdad. Badan inspeksi senjata ini dibentuk sesuai resolusi PBB no.687 yang ditandatangani 5 April 1991. Namun, Iraq dianggap tidak dapat bekerjasama dengan baik, dan akhirnya pada tanggal 16-19 Desember 1998 PBB menarik petugas-petugasnya dari Iraq.

Atas dasar itulah Amerika Serikat yakin bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, yang tidak hanya membahayakan penduduk Irak sendiri, melainkan juga mengancam penduduk kawasan bahkan dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat mulai merancang sebuah strategi baru, demi kemaslahatan banyak orang.

Kesempatan-bagi Amerika Serikat-mulai muncul bersamaan dengan aksi terorisme yang diduga kuat dilakukan kelompok Al-Qaida pimpinan Osama Bin Laden atas gedung kembar WTC (World Trade Center) dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001. Apalagi setelah itu terorisme menjadi isu global, tekanan Amerika Serikat terhadap Irak semakin gencar dilakukan. Amerika Serikat pun mulai mendesak DK-PBB untuk mengizinkan negaranya menggempur Irak. Dewan keamanan PBB mengambil jalan tengah, yaitu mengirim kembali tim inspeksi senjata PBB (UNMOVIC-United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission) ke Irak untuk memeriksa senjata-senjata Irak yang diduga mengandung unsur pemusnah massal. Tim inspeksi senjata PBB⁵ mulai menjalankan tugasnya pada

⁵ Tim inspeksi senjata PBB ini terdiri dari 30 orang tiba di Baghdad pada tanggal 28 November 2002 dibawah pimpinan Hans Blix dan merupakan tim inspeksi pertama sejak empat tahun terakhir yang

penghujung tahun 2002 dan Saddam Hussein bersedia menerima tim. Namun, politik internasional sudah berubah saat itu setelah serangan teroris 11 September 2001 Presiden Amerika Serikat George Walker Bush menyerukan pergantian rezim di Baghdad, sebab negara yang digambarkan sebagai "poros setan" tersebut amat membahayakan bagi masyarakat dunia, apabila masih tetap dipimpin oleh Saddam Hussein. Praduga keberadaan dan kepemilikan senjata-senjata pemusnah massal, rintangan terhadap tim inspeksi senjata PBB, kecurigaan adanya hubungan antara Irak dan terorisme, serta pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap sewenang-wenang dan menyalahgunakan Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan pertimbangan utama untuk tetap melakukan serangan lebih dahulu (pre-emptive strike) terhadap Irak.

Setelah gagal mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB, akhirnya Amerika Serikat mengambil langkah sendiri⁶ —dan tentunya bersama sekutunya seperti Inggris, Spanyol, Portugal—untuk menyerang Irak. Akhirnya, pada tanggal 20 maret 2003 perang dimulai dan kota Baghdad jatuh pada tanggal 1 Mei 2003.

Setelah rezim Saddam Husein Tumbang yang ditandai dengan dikuasainya ibukota Irak, Baghdad, oleh pasukan koalisi pada tanggal 8 April

⁶ Mengapa Irak tetap diserang, padahal tidak ada bukti-bukti nyata keberadaan senjata pemusnah massal serta kaitan dengan jaringan teroris internasional? Ada satu pendapat menarik, yang relevan dengan masalah tersebut, yang dipelopori oleh mantan presiden Amerika Serikat George Bush bahwa Irak mempunyai tiga masalah besar yang harus diselesaikan dengan cara Amerika, yaitu (1) Irak dipimpin oleh seorang diktator yang otoriter dan refresif, yaitu Saddam Hussein yang telah berkuasa sejak tahun 1979. dalam rangka menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika Serikat merasa perlu mengganti tokoh ini melalui sanksi-sanksi berupa resolusi DK-PBB, sampai Saddam Hussein tergulim dari kekuasaannya;(2) Irak merupakan negara yang agresif yang selalu membahayakan rakyatnya sendiri, terutama suku-suku di Utara dan Kaum Syiah di selatan.,
Membahayakan Irak juga membahayakan negara-negara tetangganya;(3) Irak dianggap sebagai negara pemilik

2003 dan ditangkapnya Saddam Husein pada tanggal 13 Desember 2003 terjadi kekosongan kekuasaan (*Vacuum of Power*) di Negeri tersebut. Masyarakat domestik Irak menghendaki terbentuknya pemerintahan sendiri yang bebas dari campur tangan asing, termasuk keterlibatan pasukan koalisi. Akan tetapi, mengingat kondisi internal Irak yang rapuh pasca-invasi serta berbagai masalah yang sulit diatasi oleh kelompok-kelompok kepentingan domestik, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat mengambil langkah konkrit yang tentunya didasarkan pada pertimbangan objektif yang ada. Oleh karena itu, pasukan koalisi—yang kemudian disebut pasukan pendudukan⁷ --menjalankan tanggungjawab dengan membuat perangkat teknik administratif yang biasa disebut sebagai pemerintahan transisi, berupa *coalition provisional authority (CPA)* dibawah pimpinan Jenderal Jay Garner dan kemudian digantikan oleh Paul B Bremer.

Dalam perkembangan selanjutnya, Paul B. Bremer --- dengan berbagai pertimbangan--- memfasilitasi pembentukan *Interim Governing Council (IGC)* yang beranggotakan 25 orang Irak. Regulasi CPA tanggal 13 Juni 2003 mengakui IGC sebagai badan utama administrasi sementara Irak.

Terbentuknya lembaga-lembaga eksekutif transisional tersebut -- khususnya *Interim Governing Council (IGC)*⁸ --tidak dengan serta-merta

⁷ Di dalam hukum internasional, pendudukan (*occupation*) pada umumnya masuk ke dalam rubrik akuisisi teritori, sebagaimana halnya dengan transfer teritori dari suatu Negara ke negara lain melalui traktat; preskripsi yang merupakan akuisisi teritori yang tadinya milik Negara lain berdasarkan kontrol efektif atas teritori tersebut; akuisisi teritori karena peristiwa alam, misalnya letusan vulkanik yang menimbulkan pulau di suatu wilayah Negara; adjudikasi; misalnya ketika Malaysia mendapatkan gugusan pulau Sipadan-Ligitan melalui Mahkamah Internasional; penaklukan. Pendudukan adalah akuisisi terhadap teritori yang tadinya, langsung sebelum diakuisisi, bukan menjadi milik suatu negara disebut *Terra Nullius*. Lihat Siti Mutiah setiawati. *Irak dibawah kekuasaan Amerika*. Yogyakarta : PPMTT-JIHI-UGM, 2004. Hal.183-185.

⁸ IGC berkomposisi berdasarkan latar belakang etnis, mazhab agama dan ideology yang eksis di Irak, yang

menciptakan ketertiban, stabilitas keamanan dan kepuasan di kalangan rakyat Irak. Tak sedikit kelompok-kelompok kepentingan beranggapan bahwa keberadaan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di Irak serta badan-badan pemerintahan yang dibentuk dan difasilitasinya tak lebih dari suatu bentuk pendudukan dan penjajahan asing atas teritorial dan kedaulatan negara mereka.

Kekecewaan-kekecewaan yang semakin mendalam yang dirasakan sebagian besar warga negara Irak, telah membawa kelompok-kelompok perlawanan pada tindakan kekerasan yang mengerikan. Mereka menyerang pos-pos dan patroli Amerika Serikat dan sekutunya. Aksi penyerangan tersebut terus berlanjut sampai akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2003 terjadi serangan bunuh diri dengan truk bermuatan bom terhadap kantor perwakilan PBB di Irak. Serangan bom bunuh diri itu menewaskan 17 orang termasuk wakil PBB untuk Irak SERGIO VIEIRA DE MELLO.⁹ Pada tanggal 22 September 2003, aksi serangan terhadap kantor perwakilan PBB di Baghdad juga terjadi, yang menewaskan 2 orang dan 19 orang mengalami luka-luka termasuk dua orang staf PBB.¹⁰

Aksi penyerangan kaum militan, tidak terbatas diarahkan kepada pasukan koalisi dan unsur-unsur asing lainnya yang berada di Irak, melainkan perbedaan-perbedaan kepentingan dan latar belakang etnis, mazhab keagamaan maupun kecenderungan sikap politik pasca tumbanginya rezim Saddam Hussein, menciptakan aksi saling serang antarkubu dan

⁹ *Kompas*, 20 Agustus 2003

¹⁰ *Kompas*, 23 September 2003

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan masalah diatas akhirnya penulis menetapkan pokok permasalahan dalam kaitannya dengan skripsi ini berupa :

"Mengapa aksi kekerasan terjadi dalam proses pembangunan demokratisasi di Irak ? "

C. Landasan Teoritik

1. Teori Kekerasan

Secara Lughawy, kata "kekerasan" menunjuk pada kata dasar "keras" yang memiliki beberapa arti antara lain "tidak mengenal belas kasihan; tidak lemah lembut; menjadi jadi; bersifat mengharuskan (memaksa)".¹² Kekerasan berarti, a) perihal (yang bersifat, berciri) keras; b) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan milik atau barang orang lain; c) paksaan.¹³ Jack D. Douglas & Francis Chopud Waksler mengatakan bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bersifat bertahan (defensive) yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi : (1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti

penjabalan; (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.¹⁴

Teoritikus kekerasan lainnya, Dom Helder Camara, mengungkapkannya tiga bentuk kekerasan dalam masyarakat manusia yang bersifat personal, institusional dan structural, yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi negara. Ketiganya saling terkait satu sama lain, kemunculan kekerasan yang satu disusul dan menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya. Awalnya dimulai dari ketidakadilan yang oleh Camera disebut sebagai kekerasan nomor satu.

"Dunia ketiga tidak akan pernah membiarkan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks direduksi menjadi bidang demografis semata-mata. Masalah demografis sungguh hanyalah sebuah dalih;-alasan yang dibuat-buat; suatu cara lain untuk menghindari masalah pokok yang luas cakupannya, yakni ketidakadilan dalam skala dunia bahwa dimanapun, kasus-kasus ketidakadilan itu adalah bentuk kekerasan. Dapat dan harus dikatakan bahwa dimanapun, ketidakadilan adalah sebuah kekerasan mendasar (basic), kekerasan nomor satu (violence no. 1)"¹⁵

Kekerasan ini sebagai gejala yang menghimpai baik perseorangan, kelompok, maupun negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi internasional. Ketidakadilan itu terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan

kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi "sub-human", yaitu keadaan hidup dibawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal. Hal ini menumbuhkan ketegangan terus-menerus ditengah masyarakat, yang mendorong munculnya kekerasan nomor dua yakni pemberontakan di kalangan masyarakat sipil, sebagaimana Camera katakan :

"Tak seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi budak Tak seorang pun berusaha untuk mengalami ketidakadilan, penghinaan dan ketidakberdayaan. Manusia yang hidup di bawah kondisi sub-human sama dengan hewan seperti sapi atau keledai yang berkubang lumpur. Ketidak-adilan ini memancing kekerasan nomor 2 (dua) berupa pemberontakan, entah dari kaum tertindas sendiri atau dari kaum muda, yang dengan kuat diarahkan untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan manusiawi".¹⁶

Lahirnya kekerasan nomor dua ini, yaitu pemberontakan sipil, yang dapat berupa protes, demonstrasi besar-besaran di jalan jalan yang menuntut adanya perubahan kondisi-kondisi yang sedang berlangsung sampai pada pemberontakan bersenjata sipil, memancing pemerintah (penguasa) untuk melakukan upaya-upaya penertiban dan penjagaan keamanan dengan cara-cara khususnya yang represif sebagai bentuk tanggung jawabnya atas ketertiban dan keamanan--dan dalam batas-batas tertentu-pertahanan Negara. Dari sini, muncullah kekerasan nomor tiga yaitu represi Negara. Dalam hal ini Camera katakan :

"Ketika konflik sampai kejalan jalan, ketika kekerasan nomor dua

wajib menjaga atau memelihara ketertiban umum, sekalipun itu berarti dipakainya kekerasan; inilah kekerasan nomor tiga. Seringkali penguasa bertindak lebih jauh lagi, dan hal ini semakin lebih umum; untuk memperoleh informasi, yang mungkin sungguh penting untuk keamanan publik, logika kekuasaan menyebabkan mereka memakai penyiksaan moral dan fisik-seolah-olah segala informasi yang didapat melalui penyiksaan tidak penting untuk diperhatikan".¹⁷

Bekerjanya tiga jenis kekerasan ini menyerupai spiral, karena itu Dom Helder Camara menyebutkan spiral kekerasan; kekerasan nomor satu atau ketidakadilan mendorong bangkitnya pemberontakan sipil atau kekerasan nomor dua. Selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi negara atau kekerasan nomor tiga. Ketika represi Negara diberlakukan, hal itu selanjutnya mempengaruhi kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor satu. Oleh karena itu, Camara katakan, "kekerasan dihadapi dengan kekerasan, dunia akan jatuh dalam spiral kekerasan."

Adapun kekerasan yang umum ditemukan dalam masyarakat dapat

disederhanakan dalam lima jenis :¹⁸

a. Kekerasan kolektif

Adalah kekerasan yang dilakukan oleh massa atau orang banyak yang berkumpul tidak terorganisir dalam kaitannya dengan nilai atau tujuan politik tertentu

b. Terorisme¹⁹

Adalah suatu kebijakan atau tindakan yang dimaksudkan untuk menyerang sasaran dengan terror kepada mereka yang terhadapnya tindakan tersebut dilakukan. Terorisme menimbulkan ketakutan akan bahaya yang bisa terjadi di masa depan.

c. Kekerasan gang

Adalah kekerasan yang dilakukan beberapa orang yang terkumpul atau terasosiasikan dalam suatu kelompok atau gang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu ekonomis maupun politis.

d. Serangan dengan memukul dan pembunuhan

e. Pemerkosaan

f. Bunuh diri

Selama Saddam Hussein berkuasa, aksi kekerasan terhadap rakyat sipil menjadi peristiwa yang hampir setiap hari muncul. Aksi teror negara terhadap kelompok-kelompok politik pinggiran—atau memang dipinggirkan—dilakukan atas dasar tanggung jawab Negara akan terjaminnya stabilitas

¹⁹ Terorisme dapat diartikan sebagai "penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)". Lihat Tim Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai pustaka, 1993. hal.339. sampai saat ini belum ada kata sepakat mengenai definisidari istilah terorisme oleh semua pihak, baik dalam hokum internasional atau berbagai organisasi yang berskala internasional dan regional. Bahkan ada beberapa Negara atau pihak yang memiliki definisi tersendiri mengenai terorisme sesuai dengan perspektifnya masingmasing. Akan tetapi dari resolusi-resolusi PBB, ada kecenderungan definisi yang mengarah pada makna "tindakan-tindakan yang mengancam, atau merenggut nyawa orang yang tidak berdosa, mengancam hak kebebasan mendasar atau melanggar martabat kemanusiaan" (Dr.Haitsam AlKailani, 200:18). Unsur penting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu ketakutan yang sangat menonjol yang ditimbulkan ditengah masyarakat ataupun pemerintah yang sah dengan sporaditas serangan yang tidak diketahui sebelumnya. Terorisme dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori kelompok yaitu :

- 1) Terorisme melawan pemerintahan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan tersebut dan menggantinya dengan pemerintahan yang lain. Dan terorisme pemerintah melawan musuh-musuhnya.
- 2) Terorisme yang digunakan gerakan-gerakan revolusioner atau organisasi-organisasi politik yang telah berhasil merebut kekuasaan untuk membersihkan pengaruh-pengaruh rezim sebelumnya.
- 3) Kekerasan yang terkadang dilakukan oleh sebagian gerakan perjuangan kemerdekaan berskala luas atau mereka tidak mampu melakukan perang kemerdekaan berskala luas atau ketika menghadapi kekuatan asing harseniata sangat tidak seimbang, atau untuk menebar kecemasan dan ketakutan diantara kekuatan

keamanan dan ketertiban atau bisa juga berupa kekhawatiran pihak penguasa yang berlebihan akan kemungkinan munculnya kekuatan tandingan, baik yang berasal dari kalangan militer maupun rakyat sipil yang memiliki ambisi-ambisi politik tertentu, yang bisa menggulingkannya dari kursi kekuasaannya.

Pada saat yang tidak diduga, dan hal ini pernah terjadi sebelumnya saat partai Baath pimpinan Saddam Hussein sendiri melakukan aksi "kudeta" baik terhadap rezim Abdul Karim Qassim (1963) maupun terhadap Abdul Rahman Arief (1968), dan bahkan "Kudeta damai" yang dilakukan Saddam Hussein sendiri terhadap Presiden Ahmad Hasan Al-Bakr (1979). Belum lagi kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang timpang antara mereka yang berada dilingkungan atau berhubungan dengan pihak penguasa dan mereka yang berada diluar lingkaran tersebut, sekalipun jumlah mereka 'mayoritas. Ketidakadilan dan penindasan atau penciptaan suasana takut oleh rezim Saddam ini secara perlahan-lahan-laten atau terbuka-menciptakan kegelisahan dan kondisi terkurung pada kekuatan-kekuatan politik pinggiran atau memang terpinggirkan yang berujung pada apa yang dikatakan Dom Helder Camara-pemberontakan sipil, yang dimulai pada aksi protes atau demonstrasi di jalan jalan sampai pada aksi kerusuhan massal atau bahkan serangan bersenjata yang diarahkan pada kekuatan rezim yang berkuasa; seperti yang terjadi pada tahun 1991 oleh golongan Arab Syiah pasca-Perang Teluk II. Kejadian ini tentunya tidak dibiarkan oleh rezim Saddam Hussein dan kemudian

secara militer kelompok perusuh atau pemberontak. Akibatnya, aksi kekerasan terus berputar pada lingkaran yang mengerikan.

1. Teori Deprivasi Relatif

Konsep Deprivasi Relatif termasuk dalam kelompok teori kontingensi.²⁰ Secara harfiah, kata Deprivasi Relatif berasal dari dua kata independen, masing-masing kata "Deprivasi (Deprivation)" yang mengandung makna "(1) pencabutan (of rights); (2) kehilangan, perampasan (of food, money, etc); dan (3) kerugian,²¹ serta kata relatif yang artinya "tidak mutlak; nisbi."²² Secara terminologis, deprivasi relative dapat diartikan sebagai persepsi aktor tentang kesenjangan antara ekspektasi nilai dan kapabilitas nilai. Ekspektasi nilai adalah kondisi atau hal-hal yang mampu—atau mereka pikir mampu—diraih dan dipertahankan. Perasaan teringkari dan tersingkirkan dalam bidang kehidupan tertentu akan mudah mengenai individu dan kelompok masyarakat sebagai akibat perubahan sosial yang cepat. Sedangkan kapasitas Nilai adalah kondisi atau hal-hal yang bisa diperoleh dan dipelihara.²³

Dalam ungkapan lain, tapi memiliki kesamaan makna, James Davies mendefinisikan Deprivasi relative sebagai akibat adanya kesenjangan rasio antara *expected need satisfaction* dan *actual need satisfaction*. Oleh Davies, suatu gerakan social terjadi karena ada dua kondisi, yaitu (1) adanya harapan dari

²⁰ Sesuatu dikatakan kontingen " jika terjadi ketergantungan pada kehadiran atau terjadinya kondisi yang tidak biasa atau menyimpang dan merupakan kondisi yang terjadi secara tiba-tiba karena terjadinya perubahan besar dalam komponen-komponen masyarakat ". pengertian ini dapat dilihat dalam Hassanuddin M Sholeh. *HMI dan Rekayasa asas tunggal pancasila*. Yogyakarta : Kelompok studi lingkaran-pustaka pelajar, 1996. Hal. 15

²¹ John M Echols & Hassan Sadily. *An English Indonesian Dictionary*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hal.176

²² Tim Dandibud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993. Hal 738

kepuasan kebutuhan yang selalu bertambah, dan (2) tiba-tiba secara dramatis harapan tersebut runtuh sehingga tidak terjadi kepuasan kebutuhan senyatanya.²⁴

Adapun pengertian nilai—menurut Ted Robert Gurr—adalah peristiwa, obyek, dan kondisi yang diinginkan serta dipertahankan manusia.²⁵ Manusia—sebagai *homo individuale* dan sekaligus *homo sociale*—biasanya berharap untuk mempertahankan apa yang mereka miliki. Mereka juga pada umumnya mempunyai sekelompok harapan dan tuntutan tentang apa yang harus mereka miliki di masa depan yang biasanya lebih besar atau lebih banyak dari yang mereka miliki sekarang. Kapabilitas nilai diindikasikan oleh hasil aktual yang dapat diperoleh manusia atau yang diberikan lingkungannya yang disebut posisi nilai.

Secara umum, nilai-nilai tersebut—dibagi dalam tiga macam, yaitu :²⁶

- 1) Nilai kesejahteraan, adalah nilai yang menunjukkan pada benda fisik dan realisasi diri, yang mencakup kebutuhan sehari-hari manusia seperti pangan, sandang, fasilitas kesehatan serta perkembangan kemampuan sosial.
- 2) Nilai kekuasaan, adalah nilai yang ditandai oleh kemampuan mempengaruhi orang lain atau menangkal campur tangan yang tidak diinginkan. Nilai ini meliputi keinginan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan serta kebutuhan untuk memperoleh perasaan aman

²⁴ Hasanuddin M. Shaleh. *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*. Yogyakarta : kelompok Studi Lingkaran-lingkaran-pustaka pelajar, 1996. Hal.17

²⁵ *Op.Cit.* Hal.66

dalam mempertahankan gagasan atau aman dari tekanan penguasa secara tidak konstitusional.

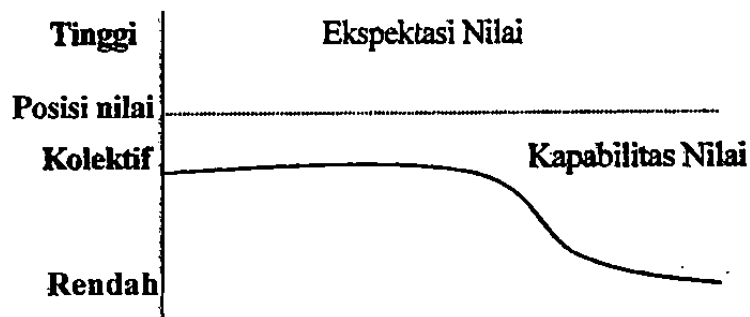
3) Nilai interpersonal adalah kepuasan psikologis yang diperoleh dari interaksi tak resmi dengan individu dan kelompok.

Deprivasi relative atas nilai-nilai kesejahteraan secara jelas dapat diamati pada perasaan tidak sesuai dan tidak puas terhadap kondisi ekonomi yang ada, karena kondisi ekonomi yang diharapkan menjadi haknya sangat tidak cocok dengan apa yang dimiliki. Untuk nilai-nilai kekuasaan, deprivasi relatifnya dapat dilihat pada perasaan yang tidak sesuai atas kesempatan berpartisipasi-yang terlalu banyak mendapat campur tangan dari pihak penguasa serta perasaan tidak puas atas lembaga, yang dianggap tidak mampu menyalurkan aspirasi. Nilai-nilai interpersonal, dalam deprivasi relatifnya, Jelas sekali dapat diamati dari hambatan-hambatan yang ditemui untuk berinteraksi dengan individu dan kelompok lain yang satu aspirasi atau idealisme, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kondisi-kondisi seperti diatas konflik bisa terjadi, baik terbuka maupun tertutup.

Dalam paparan lanjutannya, Ted Robert Gurr, membagi tiga pola deprivasi relatif²⁷, namun untuk tulisan ini penulis menggunakan pola deprivasi dekremental. Dalam kondisi ini, suatu ekspektasi nilai suatu kelompok relatif tetap konstan tetapi kapabilitas nilainya menurun. Artinya, konsensus kelompok tentang posisi nilai yang benar telah mengalami

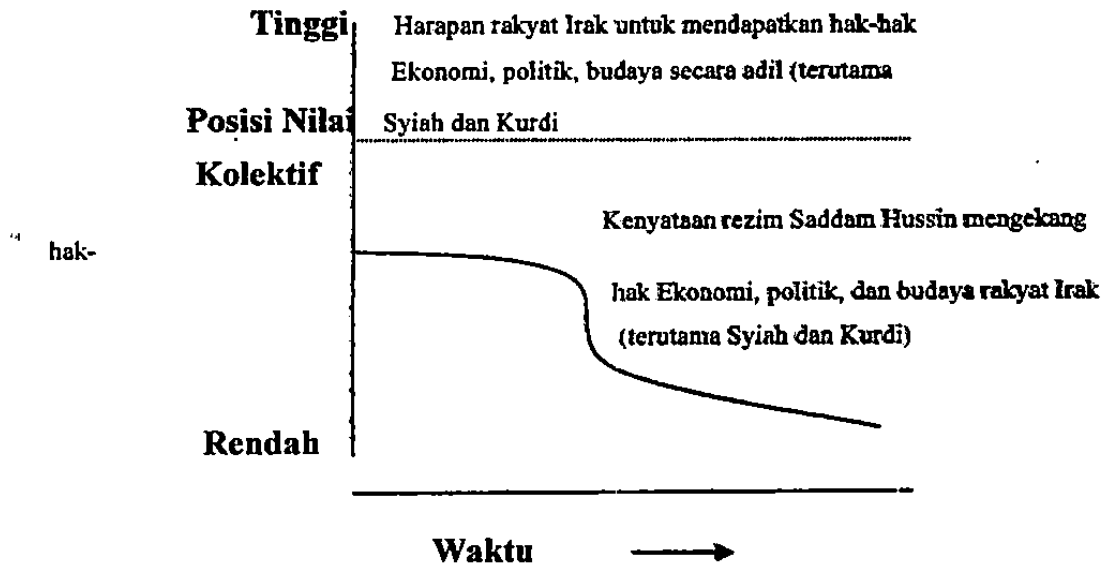
pergeseran. Namun, caracara posisi nilai yang dapat dicapai atau posisi nilai potensial mengalami penurunan drastis. Dalam situasi ini orang menjadi marah lantaran kehilangan apa yang pernah mereka miliki atau apa yang menurut mereka bisa dimiliki. Posisi nilai keseluruhan masyarakat bisa turun karena berkurangnya produksi barang material, berkurangnya kapabilitas elit politik dalam mengatur pemerintahan atau menyelesaikan krisis, masuknya pemerintahan asing dan hilangnya keteguhan dalam struktur kepercayaan masyarakat dan munculnya norma-norma tindakan baru.

Gambar. 1 Deprivasi Dekremental

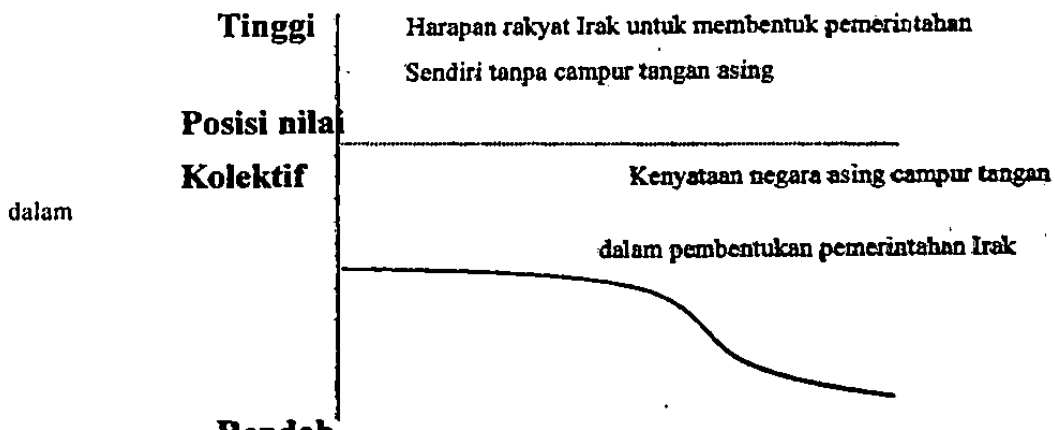


Aplikasi dalam kasus Irak :

Gambar.1.a Aplikasi di Era Saddam Hussein



Gambar.1.b Aplikasi di-Era Pasca Saddam



Dengan demikian, konflik dapat timbul apabila ada kesenjangan antara harapan dan hasil yang dicapai. Dalam catatan Walter S. Jones,²⁸ konflik dan kekerasan—semacam pemberontakan atau revolusi—paling sering terjadi pada saat berbagai kondisi yang ada mulai membaik. Perbaikan awal setelah sekian lama tertekan menumbuhkan suatu revolusi peningkatan harapan. Harapan yang tumbuh lebih cepat daripada kenyataan sehingga, tercipta kesenjangan aspirasi. Dikatakan bahwa kekerasan cenderung meningkat selama masa transisi. Pemberontakan sipil dan pembangkangan lainnya terjadi apabila rakyat merasa apa yang mereka terima kurang dari semestinya. Untuk mencari perolehan yang lebih besar atau menebus kekecewaannya, kelompok yang bersangkutan mengambil jalan agresi dan kekerasan politik.

Pada dasarnya penyebab konflik politik adalah karena adanya kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal menimbulkan konflik karena masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai kesempatan yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Sedang kemajemukan vertikal menimbulkan konflik karena adanya sekelompok kecil masyarakat yang menguasai sumber-sumber besar, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak atau kurang memiliki sumber-sumber tersebut. Polarisasi masyarakat seperti ini merupakan benih yang subur bagi tumbuhnya konflik politik. Konflik akan semakin meluas dan mendalam apabila kelompok kecil masyarakat itu mendominasi secara ketat sumber-sumber yang ada, terutama yang dianggap milik bersama, sedangkan pihak yang

tidak menguasai tidak dapat menerimanya, atau dominasi tersebut tidak mendapat legitimasi. Dengan kata lain, ketidakadilan dan kesenjangan atau ketimpangan merupakan sumber utama terjadinya konflik. Apalagi ketika melibatkan atau masuknya pihak asing--dan kemudian menduduki wilayah kedaulatan mereka--ketidakpuasan yang menimbulkan konflik semakin kompleks. Dalam hal ini, kondisi-kondisi yang berlangsung selama rezim Saddam Husein, yang jelas jelas tidak begitu memberikan ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik, budaya mereka dan tidak mendapatkan keadilan ekonomi yang memadai telah menimbulkan konflik-baik secara laten maupun terbuka--antara rakyat sipil dan pihak penguasa di Baghdad. Dan kompleksitas konflik semakin nyata, ketika pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat melakukan intervensi dalam urusan-urusan domestik Irak dan apalagi setelah melakukan invasi serta pendudukan teritorial.

3. Teori Intervensi Asing

Secara etimologis, kata "intervensi" memiliki arti "usaha campur tangan dalam perselisihan antara dua belah pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).²⁹ Sedangkan kata "asing" bermakna "datang dari luar (negara, daerah, lingkungan).³⁰ Dengan demikian, kata "intervensi asing" berarti " usaha campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya) yang datang dari luar (negeri, daerah,

²⁹ Tim Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993. Hal. 336

³⁰ Ibid. hal. 52

Arti lain dari kata "asing" dalam kamus ini adalah, (1) aneh, tidak biasa; (2) belum biasa, kaku; (3) tersendiri, terpisah sendiri, terpencil; (4) lain, berlainan, berbeda. Untuk kepentingan tulisan

lingkungan)". Dalam konteks politik internasional, kata ini secara relevan berarti "satu tindakan campur tangan dari negara lain dibidang ekonomi, politik, dan militer terhadap urusan dalam negeri dari negara lain".³¹ Dalam pengertian lain, intervensi asing merupakan campur tangan paksa yang dilakukan oleh satu atau kelompok negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan maksud untuk mempengaruhi kebijaksanaan politik dalam atau luar negeri dari negara yang diintervensi.³²

Secara umum, berdasarkan atas pengalaman-pengalaman historis politik antar bangsa, ketelibatan atau keputusan suatu negara atau beberapa negara untuk melakukan intervensi terhadap negara lain dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu:³³

- (1) Adanya undangan atau permintaan dari rezim penguasa tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam negerinya—baik dalam masalah politik maupun militer—dikarenakan kemungkinan atau memang betul-betul adanya ancaman terhadap kekuasaannya.
- (2) Adanya undangan dari partai oposisi, faksi atau pemberontak untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
- (3) Datang tanpa diundang.

K.J Holsti dalam bukunya *Politik Internasional* mengungkapkan

³¹ B.N.Marbun,SH. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003. Hal.133

³² Jack C.Plano & Roy Olton. *Kamus Hubungan-Internasional*. Jakarta ; Putra & Bardin, 1999.

³³ Dalam kasus-kasus tertentu, intervensi asing terhadap permasalahan dalam negeri suatu Negara atau bahkan telah bersifat aneksasi tertorial yang secara meyakinkan mengancam dan menghancurkan pemerintahan lokal Negara yang menjadi sasaran justru mengundang atau mendorong intervensi asing lainnya untuk datang melibatkan diri dalam permasalahan untuk mengusir kedatangan atau pendudukan dan lebih-lebih aneksasi territorial dari Negara korban. Sebagai contoh, aneksasi Irak atas wilayah Kuwait yang kemudian mengklaimnya sebagai provinsinya yang ke-19 secara integral ke dalam wilayah kesatuan republic Irak pada 2 Agustus 1990 telah mengundang datangnya pasukan multinasional-yang sebenarnya tak lebih dari apa yang disebut sebagai "kedatangan Amerika Serikat" -memasuki Kuwait

bentuk-bentuk intervensi yang dimungkinkan dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, yaitu:³⁴

(1) Tindakan Politik Rahasia

Merupakan tindakan politik untuk mempengaruhi kondisi politik negara lain melalui cara-cara yang tersembunyi, antara lain (a) menawarkan uang suap, yaitu suatu uang suap untuk pemberian jasa tertentu atas pemeliharaan sikap-sikap tertentu mengenai soal-soal penting pada masanya; (b) penyebaran propaganda tersembunyi atau melalui pemancar radio yang tidak dikenal, surat-surat kabar di bawah tanah atau surat selebaran dari asal yang tidak jelas; (c) pembunuhan para pejabat pemerintah, diplomat, partai maupun orang-orang ekonomi baik secara langsung (melalui aparat intelejen) maupun membayar atau mendorong unsur-unsur yang tidak setuju yang mau melakukan pekerjaan tersebut.

(2) Unjuk Kekuatan

Memperlihatkan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan, baik untuk membantu maupun untuk menghalangi pemberontakan dalam negeri suatu negara asing.

(3) Subversi

Mengatur, mendukung atau menggantikan berbagai unit yang tidak puas dalam suatu masyarakat atau negara.

(4) Perang gerilya (inkonstitusional)

Mengorganisasikan, mendukung, atau mengatur kegiatan revolusioner lokal

suatu negara, yang menggabungkan teror dengan serangan-serangan gerilya yang berpindah-pindah.

(5) Intervensi militer

Pengiriman sejumlah besar pasukan, baik untuk memantapkan suatu rezim terhadap para pemberontak atau membantu para pemberontak menggulingkan suatu perangkat penguasa yang telah mapan. Intervensi militer dapat juga diatur sebagai suatu alat pendukung suatu persekutuan atau negara sahabat melawan pemberontakan yang sesungguhnya atau yang diduga.

Dari berbagai hasil kajian tentang konfrontasi dan perang, K.J. Holski akhirnya menyimpulkan tujuan suatu negara melakukan intervensi dalam enam tipe utama:³⁵

- (1) Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada kepemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat negara lain.
- (2) Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik semacam ini tidak jarang mengandung nada tambahan ideologis yang kuat, dengan maksud untuk menggulingkan sebuah rezim dan kemudian mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak-pihak yang melakukan intervensi.
- (3) Konflik kehormatan nasional dimana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah

diduga. Suatu negara mungkin meningkatkan insiden tertentu yang relatif kecil menjadi krisis penuh.

- (4) Imperialisme regional, dimana suatu pemerintah menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan, dan perdagangan.
- (5) Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologi.
- (6) Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpisah.

Sering, suatu kekuasaan asing datang untuk membantu pemerintah pusat yang tengah terancam, sementara yang lain mendukung perlawanan minoritas. Berbagai golongan yang terlibat dalam perselisihan internal menjadi masalah sponsor asing yang memiliki kepentingannya sendiri. Campur tangan asing menjadi sangat penting bila negara tetangga mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai tempat perlindungan dan pangkalan para gerilyawan dan organisasi politik kelompok yang tengah bentrok. Hal ini dilihat oleh pemerintahan pusat yang terancam sebagai tindakan subversi dan cenderung menjurus menjadi konflik antar pemerintah.

Perkembangan yang berlangsung di Irak selama ini, yaitu kondisikondisi ekonomi, sosial, politik maupun budaya yang asimetris atau dapat dikatakan ketimpangan yang amat menonjol di masa rezim

menjalankan kekuasaan secara diktatorial telah menimbulkan kegelisahan-kegelisahan dan tentunya keterkekangan mendalam terhadap rakyat Irak pada umumnya terutama kelompok-kelompok politik yang - cenderung bersifat etnis dan diferensial kemazhaban berujung pada protes keras yang disertai keinginan sejumlah kalangan dari kelompok tersebut untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya melalui permintaan dukungan dan bahkan masuknya pihak asing ke dalam persoalan yang lebih dalam, termasuk percepatan penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemunculan kesadaran ini-dan terkadang dapat dilihat sebagai hal yang berlebihan-dari kelompokkelompok politik tertentu di Irak, tak jarang memunculkan interpretasi yang tidak selalu selaras dari pihak-pihak luar. Ditambah lagi kecenderungan politik pemerintah domestik dipandang tidak menguntungkan oleh sebagian masyarakat dan pemerintah dari berbagai negara-baik masalah-masalah dalam negeri maupun kebijakan-kebijakan luar negeri yang diselingi dengan penciptaan citra buruk secara global terhadap rezim Saddam Hussein dengan adanya dugaan-dugaan kepemilikan senjata-senjata pemusnah massal, sekalipun tidak terbukti, semakin menyeret persoalan-persoalan yang seharusnya diselesaikan secara internal pada tingkatan eksternal negara yang ditandai dengan masuknya pihak-pihak asing (dalam hal ini, Amerika Serikat dan sekutunya) dalam persoalan domestik Irak dan bahkan sampai melampaui batas-batas kewajaran yang oleh hukum internasional dapat dikatakan ilegal seperti yang dilakukan

langsung atas Irak yang dilanjutkan dengan pendudukan teritorial yang nyata-nyata menginjak-injak eksistensi kedaulatan suatu negara-bangsa yang diakui kemerdekaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membawa panji demokrasi dan demokratisasi.

Keinginan untuk membebaskan bangsa Irak dari cengkeraman kediktatoran Saddam Hussein oleh Amerika Serikat dan sekutunya, pada akhirnya menimbulkan efek besar pada meriaknya aksi kekerasan ditengah-tengah masyarakat Irak dan pasukan pendudukan itu sendiri, yang disebabkan oleh respons-respons dari berbagai persepsi berbeda atas persoalan yang ada serta terutama kehadiran langsung pasukan Amerika Serikat dan sekutunya di negara tersebut.

4. Teori Demokrasi

Pada awalnya kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, masing-masing kata *demos* yang artinya "rakyat" dan kata *kratos* atau *kratei* yang berarti "pemerintahan atau kekuasaan". Sederhananya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan rakyat. Rakyatlah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola pemerintahan. Dengan demikian, landasan utama dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Joseph A. Schumpeter secara sederhana memaknai demokrasi sebagai metode politik, satu mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

pemimpin-pemimpin politik yang "dipaksa" bertarung untuk memperebutkan limpahan suara. Melalui hasil pemilihan ini, politisi-politisi yang absah membuat keputusan-keputusan efektif yang mengikat bagi semua warga negara-baik sebagai penguasa maupun rakyat biasa--dengan tujuan-tujuan baik bagi kepentingan bersama. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Sebagaimana ia katakan bahwa metode demokrasi adalah :

*"Prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat"*³⁶

J. Schumpeter dalam hal ini, lebih menekankan demokrasi pada persoalan-persoalan prosedur, yang bersifat empiris, diskriptif, institusional. Gagasan demokrasi prosedural ini memandang demokrasi sebagai suatu sistem untuk memproses konflik dimana partai yang kalah dalam pemilihan umum tidak berusaha merusak rezim demi mencapai tujuannya, tetapi bersedia menerima kenyataan dan menunggu putaran berikutnya.

Adapun Robert A. Dahl menekankan responsibilitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya, yang setara secara politik sebagai sifat dasar demokrasi. Responsibilitas pemerintahan itu mensyaratkan warga negara yang memiliki kesempatan untuk : (1) merumuskan preferensinya; (2) menunjukkan preferensinya kepada warga negara lain dan pemerintah melalui

tindakan kolektif; dan (3) memberikan bobot yang sama pada preferensinya, yang dilakukan warga negara. Menurut Robert A. Dahl, ketiga kesempatan ini tergantung pada sejumlah jaminan kelembagaan berikut ini :

- (1) Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi
- (2) Kebebasan mengeluarkan pendapat
- (3) Hak memilih
- (4) Kesempatan menjadi pejabat pemerintah
- (5) Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih dukungan dan suara
- (6) Adanya sumber-sumber informasi alternatif
- (7) Pemilihan Umum yang bebas dan adil
- (8) Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah bergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya".³⁷

Pada prinsipnya, kedelapan kondisi yang dipaparkan oleh Robert A. Dahl diatas membentuk definisi kita tentang demokrasi politik. Praktisnya, demokrasi politik dapat dilihat sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut ini :

- (1) Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.
-

- (2) Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.
- (3) Tingkat kebebasan politik dan sipil-kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi-cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.³⁸

Langkah pertama dalam menentukan demokratis tidaknya suatu negara adalah mencari elemen-elemen kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik maupun sipil di negara tersebut, tidak hanya pada tataran formal, tetapi juga pada praktek yang sesungguhnya. Kompetisi atau liberalisasi menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan paling tidak bagi beberapa anggota sistem

Dengan demikian, mengukur demokratis tidaknya tatanan politik suatu negara—dengan menggunakan pendekatan Robert A. Dahl di atas—dapat dilakukan dengan menggunakan dua dimensi, yaitu (1) seberapa tinggi tingkat kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; dan (2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.

Sedangkan, dalam transisi menuju demokrasi, Samuel P. Huntington mengajukan empat pola, yaitu (1) pola transformasi, dimana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi; (2) pola "replacement"

³⁸ George Sorensen. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003. Hal.1920. Dalam bukunya ini (hal : 42), George Sorensen merangkum empat pra-kondisi menuju demokrasi, yaitu (1) modernisasi dan kesejahteraan; (2) budaya politik, yaitu sistem nilai dan keyakinan yang menjelaskan konteks dan makna dari tindakan politik; (3) struktur sosial masyarakat, yaitu kelas dan kelompok tertentu dalam masyarakat; (4) faktor-faktor eksternal, yaitu sector-sektor ekonomi, politik dan elemen-

dimana kelompok-kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi; (3) pola "transplacement" dimana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dan kelompok oposisi; (4) pola intervensi, dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar.³⁹

D. Hipotesa

Hipotesa, menurut Mohtar Has'oe'd, adalah proposisi yang memiliki dukungan teoritis tetapi tidak atau belum didukung fakta empiris.⁴⁰ Atau dengan kata lain, hipotesa adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan.⁴¹

Kenneth R. Hoover dalam bukunya *Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Sosial* mengatakan bahwa tujuan hipotesa adalah untuk mengorganisir suatu penelitian. Jika hipotesanya dibentuk dengan cermat, semua langkah metode Ilmiah mengikuti-demikian pula garis besar proyeknya, suatu bibliografi, suatu daftar sumber-sumber yang dibutuhkan dan suatu spesifikasi ukuran-ukuran yang cocok buat suatu penelitian atau studi.⁴²

Dan oleh karena itu, setelah mempertimbangkan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan dalam rumusan ini, maka dapat ditarik hipotesis bahwa gelombang aksi kekerasan dalam proses pembangunan demokratisasi yang berlangsung di Irak didorong oleh dua faktor utama, yaitu :

³⁹ Mohtar Mas'oe'd. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2003. Hal. 3536

⁴⁰ Mohtar Mas'oe'd. *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta : LP3ES, 19. Hal.177-178

⁴¹ Tim Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993. hal.310

1. Upaya Rezim Saddam Hussein untuk mempertahankan kekuasaannya.
2. Adanya intervensi asing (Amerika Serikat dan sekutunya).

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dimulai dengan pemaparan dan penggunaan teori maupun konsep yang relevan dengan permasalahan yang diangkat yang disertai oleh suatu hipotesa yang dipertimbangkan secara hati-hati yang akan dibuktikan dengan data-data empiris yang telah diseleksi. Adapun pengumpulan data untuk kepentingan tulisan ini didasarkan pada studi kepustakaan atau *library research*. Dengan demikian, bersifat sekunder, yang sumber-sumbernya berasal dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, diktat kuliah, makalah-makalah ilmiah, internet, dan lain-lainnya.

F. Jangkauan Penelitian

Pembatasan masalah dan ruang lingkup suatu penelitian ilmiah sangat penting agar apa yang diteliti jelas dan tidak melebar serta memudahkan bagi pekerjaan dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuannya. Untuk kepentingan penelitian (skripsi) ini, penulis mencoba menggali, mengolah dan menganalisis data-data yang sifatnya sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tema “gelombang aksi kekerasan dalam proses pembangunan demokrasi Irak” mulai sejak menjelang jatuhnya Rezim Saddam Hussein sampai Pemilu Februari 2006.

1. Aksi kekerasan, dalam kenyataannya amat dominan dalam masa tersebut, baik pada masa rezim Saddam Hussein berkuasa maupun pasca kejatuhannya.
2. Dan dalam hal lain, upaya demokratisasi yang di terapkan oleh kaum oposisi pada masa Saddam Hussein berkuasa lebih nyaring dibanding masa-masa sebelumnya, dan apalagi setelah kejatuhannya, upaya (demokratisasi) tersebut semakin gencar dan bahkan melibatkan intervensi asing (Amerika Serikat dan sekutunya).

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah; rumusan masalah; landasan teori; hipotesa; metode penelitian; jangkauan penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II. Dalam bab ini menjelaskan tentang proses jatuhnya rezim Saddam Hussein yang mencakup pemerintahan Saddam Hussein, proses jatuhnya rezim tersebut, pengertian demokrasi, serta intervensi asing dalam proses pembangunan demokratisasi di Irak.

Bab III. Bab ini memberikan uraian tentang terjadinya gelombang aksi kekerasan.

Bagian ini akan menjangkau tiga bagian utama, yaitu pengertian aksi kekerasan, bentuk-bentuk aksi kekerasan, dan gelombang aksi kekerasan baik yang berlangsung di era Saddam Hussein maupun pasca Saddam Hussein.

Bab IV. Bab ini menjelaskan sebab-sebab terjadinya aksi kekerasan di Irak yang akan memuat dua bahasan, yaitu upaya rezim Saddam Hussein mempertahankan kekuasaannya (totalitarianisme negara), dan intervensi asing (Amerika Serikat dan sekutunya).

Bab. V. merupakan bab kesimpulan, yaitu berisikan beberapa

.